

Hasto Memang Ditarget Masuk Penjara Sebelum Kongres PDIP 2025

Category: Politik

written by Redaksi | 09/01/2025



ORINEWS.id – Tim Hukum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ([PDIP](#)) telah mendapat informasi bahwa Sekretaris Jenderal (Sekjen) Hasto Kristiyanto memang sudah ditarget agar ditahan di dalam jeruji besi.

Bahkan target itu harus tercapai sebelum pelaksanaan Kongres partai yang rencananya digelar tahun 2025 ini.

Hal itu diungkapkan Ketua DPP PDIP bidang Reformasi Hukum Ronny Talapessy, dalam konferensi pers tim hukum, di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis, 9 Januari 2025.

“Kami mendengar informasi bahwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto ditargetkan akan ditahan sebelum Kongres PDI Perjuangan yang akan berlangsung dalam waktu dekat,” ungkap Ronny.

Ronny mengurai bahwa penahanan Sekjen Hasto Kristiyanto bertujuan untuk mengganggu proses konsolidasi partai. Penahanan itu juga dimaksudkan untuk menekan PDIP agar tidak lagi bersuara kritis terhadap perusakan demokrasi dan konstitusi yang dilakukan oleh mantan Presiden [Joko Widodo](#) beserta aparaturnya di pengujung kekuasaan.

“Semua proses sejak dari pemanggilan, penyitaan properti pribadi, pentersangkaan, dan penggeledahan kediaman Sekjen Hasto Kristiyanto kami nilai tidak menunjukkan upaya yang murni demi penegakan hukum, tetapi merupakan bagian dari rangkaian operasi [Politik](#) dengan target mengganggu, mengawut-awut, internal partai jelang kongres,” bebernya.

Atas dasar temuan fakta itu, Ronny lantas menyebut bahwa, pimpinan [KPK](#) saat ini dapat disebut sebagai KPK Edisi [Jokowi](#).

“Di akhir kekuasaannya, mantan presiden Joko Widodo tidak menghiraukan kritik publik, baik dari eks komisioner, eks penyidik, kalangan akademisi, media, dan masyarakat sipil lainnya agar menghentikan proses seleksi dan menyerahkannya kepada pemerintahan [Prabowo](#) yang tinggal menunggu sedikit waktu lagi untuk dilantik,” jelas dia.

“Sehari sejak dilantik, KPK edisi Jokowi langsung bekerja menjalankan agenda kriminalisasi, dalam bentuk pemidanaan yang dipaksakan, terhadap PDI Perjuangan melalui Sekjen Hasto Kristiyanto karena bersuara kritis terhadap kerusakan demokrasi yang dilakukan Jokowi,” sambungnya.

KPK Edisi Jokowi, masih kata Ronny, pada akhirnya tidak akan menggubris dan menindaklanjuti banyaknya laporan masyarakat sipil terhadap dugaan pencucian uang, penyelundupan nikel mentah, skandal izin tambang blok medan, yang diduga melibatkan Bobby Nasution dan keluarga Jokowi lainnya.

Lebih jauh, Ronny pun menyerukan agar semua kader, simpatisan, dan keluarga besar PDI Perjuangan tetap solid di bawah kepemimpinan Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri dan tidak

terprovokasi oleh pihak-pihak yang hendak meng-awut-awut partai.

“PDI Perjuangan akan terus mengikuti dan menghormati proses hukum dengan tetap mengikuti hukum acara pidana yang ada,” pungkasnya. []